

# ANALISIS PENGEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Oleh : Nur Azizah, SE, MM

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan - Fakultas Ekonomi Unijoyo

## Abstraksi

*Kegiatan investasi merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah dalam rangka otonomi daerah. Melalui kajian ini, akan ditelaah tentang pengembangan investasi yang sudah dilakukan, berbagai potensi ekonomi dan peluang investasi di Kabupaten Bangkalan, baik berdasarkan nilai indikator kelayakan investasi maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki. Berbagai analisis situasi yang meliputi kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal yang dimiliki Kabupaten Bangkalan dalam upaya pengembangan kegiatan investasi juga di kaji lebih dalam. Melalui kajian ini juga dikaji beberapa isu strategis atau permasalahan investasi pada penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bangkalan.*

**Kata Kunci:** Investasi, Otonomi Daerah

## I. PENDAHULUAN

Investasi merupakan suatu kebutuhan pokok yang didambakan dan diperebutkan oleh setiap negara dalam upaya menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat masing-masing negara. Dalam rangka perubahan konstelasi nasional maupun global, munculnya otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan kewilayahan yang semakin meningkat di Indonesia, memicu persaingan antar daerah untuk menarik investasi sebagai bagian dari upaya pengembangan daerah. Persaingan tersebut merupakan hal yang wajar, sebagai konsekuensi proses desentralisasi kewenangan untuk mengembangkan daerah secara mandiri.

Paradigma pembangunan nasional yang mengedepankan asas desentralisasi telah menetapkan kabupaten/kota sebagai wilayah otonom. Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota, sebagai penanggung jawab daerah otonom, bertanggung jawab melaksanakan bidang-bidang pemerintahan, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Pemda kabupaten/kota juga berwenang mengelola kawasan otorita lainnya yang terletak dalam daerah otonom,



seperti bandara, pelabuhan, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain.

Implikasi otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu pertimbangan dalam pembentukan daerah otonom adalah didasarkan atas kemampuan ekonomi dan potensi daerah, disamping pertimbangan sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan keamanan dan lainnya yang memungkinkan terselenggarakannya otonomi daerah. Maka konsekwensi dari penyelenggaraan otonomi daerah ini adalah menuntut daerah otonom untuk menggali sumber keuangan sendiri, walaupun daerah masih mendapat dukungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu bentuk penggalan dan pengembangan potensi daerah adalah penanaman modal/investasi, baik dalam bentuk pengalokasian dana pembangunan maupun pengaturan pihak yang berinvestasi, kepada potensi yang ada di daerah secara tepat dan terarah. Potensi bisa meliputi sumberdaya alam, manusia, buatan (sarana-prasarana) ataupun sumberdaya sosial. Investasi yang tepat dan terarah diharapkan dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan pemerataan dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Investasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung, tetapi juga menjadi indikator penting untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan regional.

Pemda Kabupaten Bangkalan, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), penanggung jawab perencanaan pembangunan di kabupaten, telah menyusun cetak biru (*masterplan*) pengembangan penanaman modal Kabupaten Bangkalan pada tahun 2007. Dalam *masterplan* tersebut didapatkan informasi gambaran umum kabupaten, perkembangan investasi dan analisa terhadap peluang-peluang investasi di Kabupaten Bangkalan di berbagai sektor, seperti sektor pariwisata, agribisnis (pertanian), industri, jasa, transportasi, dan telekomunikasi. Sedangkan melalui penelitian ini, akan diidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan kegiatan investasi, yang timbul di Kabupaten Bangkalan.

## II. GAMBARAN UMUM INVESTASI DI KABUPATEN BANGKALAN

Penyelenggaraan penanaman modal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan



lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan ini akan tercapai jika terdapat koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi ini harus sejalan dengan semangat otonomi daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah.

Hingga akhir tahun 2007, instansi daerah di Kabupaten Bangkalan yang diberi tugas untuk pengembangan penanaman modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan No. 46 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal, maka fungsi dari Dinas perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan penanaman modal.
2. Pengkoordinasian segala kegiatan penanaman modal serta penyiapan sarana dan prasarana
3. Pembentukan jaringan informasi dengan pengusaha dalam dan luar negeri bidang penanaman modal dalam rangka melaksanakan promosi
4. Pemberian kemudahan untuk memperoleh bantuan modal/perijinan
5. Pengembangan dan kemitraan usaha bidang penanaman modal
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, bidang penanaman modal.

Dengan tugas pokok dan fungsi ini Dinas Perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal merupakan pintu utama bagi para investor dalam melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Bangkalan.

Namun, di tahun 2008, struktur organisasi pemerintahan kabupaten Bangkalan berubah. Sub dinas Penanaman Modal tidak lagi dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal, tetapi berada di bawah tanggung jawab bagian Penanaman Modal, pemerintahan Umum, Sekretariat pemerintah Daerah. Segala bentuk perijinan akan menjadi tanggung jawab instansi tersendiri yang tidak berkaitan sama sekali dengan dinas terkait penanaman modal, seperti Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Prasarana Wilayah, dan Satpol Pamong Praja.

Program dan kegiatan pengembangan penanaman modal yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal kabupaten Bangkalan antara lain:



1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  
Program ini dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut:
  - a. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah.
  - b. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
  - c. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - d. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi.
  - e. Penyelenggaraan Pameran Investasi.
2. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana Daerah. Kegiatan yang dilakukan adalah Kajian Potensi Sumber Daya Terkait dengan Investasi.

Sementara itu, Kegiatan penanaman modal/investasi yang sudah dilakukan di kabupaten Bangkalan sejak tahun 1995 sampai tahun 2008 mencapai nilai investasi sebesar Rp. 641.823.125.599,- untuk 165 unit kegiatan dengan pelaku utamanya adalah pihak swasta dan perorangan (Tabel 1). Pelaku penanaman modal di Kabupaten Bangkalan ini banyak di dominasi oleh perusahaan Yang bergerak dalam bidang telekomunikasi seperti PT Telkomsel, PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama, PT Solusindo Kreasi Pratama, dan lain-lain. Sedangkan bidang atau sektor properti antara lain dilakukan oleh PT Perkasa Krida Hasta Indonesia, PT Trunojoyo asri, R Purnama Candra Hasan, dan perusahaan-perusahaan lain.

Sumber penanaman modal tersebut masih banyak dilakukan oleh penanam modal dalam negeri (PMDN), yang mencapai 128 ijin usaha atau sebanyak 80,5% dari total ijin usaha yang diberikan kepada investor di Kabupaten Bangkalan dari tahun 1995 sampai tahun 2008, dengan nilai investasi sebesar Rp. 606.861.486. 711,-. Sedangkan sisanya, sebanyak 19,5% atau 31 ijin usaha merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi Rp. 34.961.638.888,- dan bidang telekomunikasi merupakan bidang yang banyak diminati oleh penanam modal/investor asing.



**Tabel 1 : Daftar Kegiatan Investasi per Sektor di Kabupaten Bangkalan Tahun 1995 sampai 2008**

No	Sektor	Banyaknya Investasi (Unit)	Nilai Investasi (Rp)
1	Industri	5	24.527.000.000
2	Jasa	7	26.257.000.000
3	Pertambangan	2	18.600.000.000
4	Properti	39	545.760.435.095
5	Telekomunikasi	106	26.678.690.504
Jumlah		159	641.823.125.599

Sumber: Diolah dari Daftar Investasi di Kabupaten Bangkalan 1995-2008, Disperindag dan PM

Masuknya investasi/penanaman modal ke suatu daerah tentunya akan berdampak positif pada kenaikan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Kegiatan penanaman modal akan membuka kesempatan kerja bagi penduduk setempat, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran di daerah tersebut. Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa masuknya penanam modal di Kabupaten Bangkalan sampai tahun 2008 telah mampu menyerap 2.812 orang tenaga kerja. Sektor properti adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 1.275 orang, sektor industri mampu menyerap 919 orang tenaga kerja, sektor telekomunikasi menyerap 329 orang tenaga kerja, dan sektor jasa mampu menyerap 136 orang tenaga kerja.

### III. PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN BANGKALAN

Berdasarkan data *master plan* pengembangan penanaman modal Kabupaten Bangkalan tahun 2007, diperoleh informasi tentang berbagai potensi yang memiliki peluang sebagai investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bangkalan. Beberapa sektor peluang investasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Sektor pariwisata, meliputi: Wisata Alam, wisata Sejarah, wisata Ziarah
2. Sektor Agrobisnis
  - a. Sub Sektor Pertanian, meliputi: Budidaya mangga, budidaya Pisang, budidaya Rambutan, Budidaya Padi, dan budidaya Jagung
  - b. Sub Sektor Peternakan, meliputi: Ayam kampung, Ayam Petelur, Sapi Potong, dan Peternakan Kambing
  - c. Sub Sektor Perikanan, meliputi: Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau (Tambak), Budidaya Ikan Air Laut, karamba Jaring Apung, Tambak/Kolam, dan Pembenuhan Ikan



- d. Sub Sektor Kehutanan, meliputi: Kelapa, Kapuk, Siwalan, Tanaman Melati, dan Cabe Jamu
3. Sektor Industri, meliputi: pembuatan Kapal Tradisional, pembuatan Meubel, Pembuatan Tepung Maizena, Pembuatan Tepung Beras, Pembuatan Krupuk Ikan, Pembuatan Jamu Tradisional Madura, Pengalengan Ikan/Udang, Pembuatan Ikan Asin, Pembuatan Terasi, Pabrik Es, Galangan Kapal, dan Pabrik Semen
  4. Sektor Jasa, meliputi: Mendirikan Rumah Sakit, Mendirikan BPR, Biro Travel, Mendirikan Salon, dan Mendirikan Café
  5. Sektor Transportasi, meliputi: Kapal Feri, Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan, Mobil Penumpang Umum
  6. Sektor Telekomunikasi, meliputi: Warnet/Wartel, Pemancar Radio FM, dan Pemancar Telepon Seluler

Masterplan pengembangan penanaman modal Kabupaten Bangkalan tahun 2007 juga mengemukakan nilai indikator kelayakan investasi semua sektor dan sub sektor di atas. Berdasarkan indikator inilah prioritas sektor yang perlu dikembangkan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Bangkalan dilakukan. Proses prioritas menghasilkan beberapa sektor prioritas yang memiliki peluang investasi untuk dapat dikembangkan baik dalam jangka pendek/menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Bangkalan. Berikut ini merupakan 10 (sepuluh) sektor/sub sektor yang memiliki prioritas untuk dapat dikembangkan dalam jangka pendek:

Prioritas ini didasarkan pada cepatnya tingkat pengembalian modal awal dari investasi yang dilakukan (*payback Period-PP*) dan *Profitability Index* (PI). Pada Tabel 2 dapat dilihat rangkuman hasil perhitungan *payback periode* dan *profitability index* peluang investasi di Kabupaten Bangkalan. Sektor/sub sektor yang memiliki tingkat pengembalian modal paling cepat dan *profitability index* paling besar memiliki prioritas untuk dikembangkan. Budidaya padi merupakan sub sektor yang memiliki tingkat pengembalian modal paling cepat, yaitu 0,38 tahun dan *profitability index* paling besar, yaitu 13,17. Prioritas peluang berikutnya adalah pembenihan ikan dengan tingkat pengembalian modal sebesar 1 tahun dan PI 5, Tingkat pengembalian modal budidaya Rambutan sebesar 1,27 tahun dan PI sebesar 3,93. Tambak/kolam dengan tingkat pengembalian modal sebesar 1,27 tahun dan PI 3,93. Siwalan dengan tingkat pengembalian modal sebesar 1,27 tahun dan PI 3,93. Tanaman melati dengan tingkat pengembalian modal 1,27 tahun dan PI sebesar 3,93. Tingkat pengembalian modal budidaya jagung sebesar 1,8 tahun dan PI sebesar 2,78. Budidaya pisang dengan tingkat pengembalian modal sebesar 2,5 tahun dan PI sebesar 2.



Budidaya air payau (tambak) dengan tingkat pengembalian modal sebesar 2,5 tahun dan PI 2. Pembuatan meubel dengan tingkat pengembalian modal sebesar 2,71 tahun dan profitability index sebesar 1,84.

**Tabel 2 : Rangkuman Hasil Perhitungan *Payback Periode* dan *Profitability Index* Peluang Investasi di Kabupaten Bangkalan**

No	Sektor/Sub Sektor	<i>Payback Periode</i>	<i>Profitability Index</i>
1	Budidaya Padi	0,38	13,17
2	Pembenihan ikan	1	5
3	Budidaya Rambutan	1,27	3,93
4	Tambak/Kolam	1,27	3,93
5	Siwalan	1,27	3,93
6	Tanaman Melati	1,27	3,93
7	Budidaya Jagung	1,8	2,78
8	Budidaya Pisang	2,5	2
9	Budidaya Air Payau (Tambak)	2,5	2
10	Pembuatan Meubel	2,71	1,84

Sumber: Diolah dari Daftar Indikator Finansial Peluang Investasi, Masterplan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Bangkalan, 2007

Sedangkan sektor/sub sektor yang memiliki prioritas untuk dapat dikembangkan dalam jangka panjang dilihat dari manfaat mendatang yang dapat dirasakan dari adanya investasi, yang diukur dengan metode Net Present Value (NPV). Tabel 3 merupakan rangkuman hasil perhitungan NPV dari 10 (sepuluh) sektor/sub sektor investasi di Kabupaten Bangkalan. Investasi yang memiliki NPV paling besar merupakan peluang yang di prioritaskan. Berdasarkan data dari master plan penanaman modal Kabupaten Bangkalan tahun 2007, berikut ini 10 (sepuluh) besar sektor/sub sektor peluang investasi yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang di Kabupaten Bangkalan:

**Tabel 3 : Rangkuman Hasil Perhitungan NPV Investasi di Kabupaten Bangkalan**

No	Sektor/Sub Sektor	NPV
1	Pabrik Semen	48.412.698.413
2	Mendirikan Rumah Sakit	561.678.005
3	Mendirikan BPR	164.172.336
4	Ayam Kampung	126.349.467
5	Budidaya Air Tawar	126.349.467
6	Galangan Kapal	126.349.467
7	Kapal Feri	121.655.329
8	Budidaya Air Payau (tambak)	106.575.964
9	Angkutan Kota	84.013.605
10	Pengalengan Ikan/udang	82.766.440

Sumber: Diolah dari Daftar Indikator Finansial Peluang Investasi, Masterplan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Bangkalan, 2007

Nilai NPV industri pabrik semen merupakan yang paling besar, yaitu Rp. 48.412.698.413,-. Namun demikian investasi ini membutuhkan nilai investasi yang sangat besar mencapai Rp. 3.500.000.000.000,- dan tingkat pengembalian modalnya juga cukup lama, yaitu 4,12. Prioritas kedua adalah mendirikan rumah sakit yang memiliki nilai NPV sebesar Rp. 561.678.005,-. Mendirikan rumah sakit mempunyai NPV sebesar Rp. 164.172.336,-. Nilai NPV untuk budidaya ayam kampung, budidaya air tawar, dan industri galangan kapal memiliki nilai NPV yang sama, yaitu sebesar Rp. 126.349.467,-. Kemudian kapal feri menjadi prioritas berikutnya dengan nilai NPV sebesar Rp. 121.655.329,-. Budidaya air payau (tambak) memiliki nilai NPV Rp. 106.575.964,-. Angkutan kota dan industrin pengalengan ikan/udang dengan nilai NPV masing-masing sebesar Rp. 84.013.605,- dan Rp. 82.766.440,-.

#### **IV. LOKASI POTENSI INVESTASI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM**

Dua sumberdata penentuan lokasi potensi unggulan yang digunakan adalah kawasan-kawasan tertentu yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bangkalan dan besaran produksi komoditas pada tahun 2006 di Bangkalan dalam Angka 2007.

##### **1. Lokasi Potensi Tanaman Pangan**

Tidak semua kecamatan memiliki potensi tinggi pada produksi tanaman pangan. Terdapat 9 dari 18 kecamatan yang tidak memiliki keunggulan komparatif di satupun komoditas tanaman pangan. Sementara itu, secara umum lokasi potensi tanaman pangan ada di kecamatan Geger dan Blega. Berdasarkan data tahun 2006, Kecamatan Geger memiliki keunggulan komparatif, yaitu produksi



empat komoditas tanaman pangan yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Keempat komoditas tersebut adalah padi, ubikayu, kacang hijau, dan kacang tanah. Kecamatan Blega unggul di tiga komoditas, yaitu padi, jagung dan kedelai.

## 2. Lokasi Potensi Tanaman Perkebunan

Hampir semua kecamatan di Bangkalan memiliki keunggulan komparatif untuk komoditas perkebunan. Hanya 4 (empat) kecamatan, yaitu Labang, Tragah, Burneh, dan Sepulu yang tidak memiliki satu pun komoditas unggulan. Keunggulan komparatif tanaman perkebunan dimiliki oleh Kecamatan Bangkalan, Kokop, Blega, Konang dan Galis. Kecamatan Bangkalan dan Kokop memiliki empat komoditas unggulan dan tiga kecamatan lainnya memiliki tiga komoditas unggulan.

## 3. Lokasi Potensi Tanaman Hortikultur

Seperti halnya tanaman perkebunan, tanaman hortikultur merupakan komoditas unggulan di hampir semua kecamatan. Tiga kecamatan yang secara komparatif tidak memiliki keunggulan adalah Kwanyar, Konang dan Tragah. Sementara itu, kecamatan yang kaya akan keunggulan komparatif di kelompok tanaman ini adalah Galis (5 komoditas), Geger (6 komoditas) dan Labang (4 komoditas).

## 4. Lokasi Potensi Perikanan

Potensi perikanan meliputi perikanan laut dan perikanan darat (tambak, kolam dan perairan umum). Kecamatan yang berpantai sudah sepatutnya memiliki keunggulan komparatif pada komoditas ini dibandingkan kecamatan non pantai. Namun, ada tiga kecamatan berpantai yang pada tahun 2006 tidak memiliki keunggulan komparatif di komoditas perikanan, yaitu Labang, Kwanyar, dan Modung. Sebaliknya, kecamatan non pantai yang memiliki keunggulan perikanan, dalam hal ini perikanan darat adalah Blega dan Burneh. Sementara itu, kecamatan yang memiliki keunggulan komparatif laut maupun darat adalah Tanjung Bumi dan Klampis.

## 5. Lokasi Potensi Peternakan

Dua per tiga (12) kecamatan di kabupaten Bangkalan memiliki sedikitnya satu keunggulan komparatif di sektor ini. Sisanya, yaitu kecamatan Klampis, Sepulu, Arosbaya, Blega, Modung, dan Kwanyar tidak memiliki keunggulan komparatif, meskipun berbagai jenis komoditas peternakan tetap bisa dijumpai di kecamatan-kecamatan ini. Sementara itu, kecamatan yang unggul di sektor ini adalah Galis, Tanah Merah, dan Burneh. Ketiga kecamatan ini memiliki keunggulan yang sama, yaitu pada ternak unggas.



#### **6. Lokasi Potensi Pertambangan**

Lokasi potensi pertambangan di Kabupaten Bangkalan ditemui di 5 kecamatan. Kecamatan dengan sedikitnya satu komoditas unggul dibandingkan kecamatan lain adalah Geger, Burneh, Socah dan Konang. Sementara itu, kecamatan yang paling unggul di sektor ini adalah kecamatan Geger dengan dua jenis komoditas galian.

#### **7. Lokasi Potensi Umum Sumberdaya Alam (Gabungan)**

Jika di rekapitulasi, semua kecamatan di Kabupaten Bangkalan memiliki sedikitnya satu komoditas berbasis sumberdaya alam yang unggul dibandingkan kecamatan lainnya (keunggulan komparatif). Kecamatan dengan sedikit keunggulan komparatif adalah Kwanyar dan Tragah. Sementara itu, kecamatan yang paling banyak komoditas unggulannya adalah kecamatan Geger, Galis, Tanah Merah.

### **V. ANALISIS SITUASI INVESTASI DI KABUPATEN BANGKALAN**

#### **Kekuatan Internal dan Eksternal**

Kebijakan investasi/penanaman modal yang baik adalah jika mampu melibatkan partisipasi masyarakat setempat, sehingga mampu mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pemerintah kabupaten Bangkalan telah menerapkan kebijakan tersebut, melalui pemberian ijin kepada suatu perusahaan untuk menanamkan modal dan membuka usaha jika investor bersedia mempekerjakan/melibatkan masyarakat sekitarnya. Ini berarti telah ada kebijakan (lokal) investasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bangkalan, yang perlu diteruskan di masa-masa mendatang.

Schubungan dengan investasi, Kabupaten Bangkalan telah memiliki Dewan Konseling, yang selama ini telah berfungsi baik dalam menangani berbagai permasalahan yang dialami investor di Kabupaten Bangkalan. Para investor yang memiliki masalah dapat melaporkan dan berkonsultasi kepada dewan ini. Setelah solusi di berikan oleh dewan ini, investorpun dapat mengajukan banding ke dewan serupa di tingkat propinsi jika masih merasa tidak puas. Namun, sejauh ini diakui keberadaan dewan ini telah cukup menyelesaikan permasalahan yang sedang/pernah dihadapi investor di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan juga sangat potensial untuk menjadi lokasi penanaman modal, terutama terkait dengan potensi sumberdaya berbasis alam yang dimiliki, baik dalam bentuk sumberdaya alam maupun manusianya. Terdapat banyak lokasi potensi sumberdaya alam yang unggul secara komparatif di beberapa lokasi (kecamatan) di Bangkalan, namun belum dikembangkan secara optimal. Di sisi lain,



sumberdaya manusia Kabupaten Bangkalan yang dikenal ulet dan kuat (terutama untuk pekerjaan-pekerjaan) yang mengandalkan fisik, merupakan potensi tersendiri sebagai tenaga kerja beberapa pekerjaan tertentu. Dengan menambahkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pasar kerja, kualitas sumberdaya manusia Bangkalan dapat ditingkatkan untuk memberikan nilai tambah pada potensi yang telah ada. Latar belakang masyarakat yang dominan agamis sangat berpeluang pada pengembangan model investasi berbasis syariah (Agama Islam). Selain itu, banyaknya lembaga sosial dalam bentuk pesantren, ormas atau kelompok kemasyarakatan informal lainnya, seperti arisan, yasinan, dll, merupakan sumberdaya sosial yang siap/dapat diberdayakan untuk membangun Kabupaten.

Berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi telah dilakukan antara lain adalah dengan mengeluarkan undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini sudah mencakup semua aspek penting, termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak, dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor, yang terkait dengan upaya peningkatan investasi dari pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi investor. Berbagai ketentuan tersebut akan berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bangkalan, jika dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah mengenai ketentuan pelayanan terpadu satu pintu, dimana ketentuan ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Kedua, mengenai kebijakan dasar penanaman modal: menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional menetapkan :
- a. Kabupaten Bangkalan sebagai bagian wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan), **Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam sistem perkotaan nasional** di Propinsi Jawa Timur. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa propinsi. Hingga tahun 2009, wilayah Gerbangkertosusila baru memasuki tahap pengembangan I dengan Program Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional dan dalam taraf revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi.



- b. Rencana pembuatan jalan bebas hambatan (tol) Surabaya-Madura, kepanjangan jembatan Suramadu, sebagai bagian dalam **sistem jaringan transportasi nasional**.
- c. Kawasan Gerbangkertosusila sebagai salah satu kawasan andalan di Jatim, khususnya di sektor unggulan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.
- d. Kawasan Gerbangkertosusila sebagai kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi.

Selanjutnya, sebagai penjabaran dari RTRW Nasional, RTRW Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2020 juga menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai bagian yang terintegrasikan dengan pembangunan di pusat Jawa Timur, yaitu Surabaya. Berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur, ada rencana pengembangan kawasan industri di Bangkalan Selatan (kaki jembatan Suramadu) dan Tanjung Bumi, pengembangan industri kecil di Bangkalan dan kawasan industri kecil-menengah di Klampis dan Sepulu. Dalam RTRW tersebut dijelaskan pula bahwa Kabupaten Bangkalan akan digolongkan sebagai wilayah kepulauan dan potensial di sektor pertanian, khususnya perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ini berarti industri kecil-menengah yang berpeluang untuk dikembangkan adalah industri berbasis perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Realisasi Jembatan Suramadu yang diperkirakan selesai dan beroperasi di tahun 2009 merupakan awal proses industrialisasi dan komersialisasi di Madura, termasuk di Kabupaten Bangkalan. Uraian di atas berimplikasi pada adanya peluang dukungan penuh terhadap pembangunan Kabupaten Bangkalan, termasuk bagi pengembangan penanaman modal. Realisasi Jembatan Suramadu akan membuka peluang pengembangan bagi sektor industri, perdagangan, dan jasa-jasa, memperlancar arus barang dan jasa dari dan ke luar Madura. Kondisi ini akan menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Madura umumnya dan Kabupaten Bangkalan khususnya.

### **Kelemahan Internal dan Eksternal**

Masalah birokrasi perizinan yang rumit merupakan salah satu faktor penghambat bagi pengembangan investasi di Kabupaten Bangkalan. Hambatan tersebut mencakup jumlah prosedur serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Seorang investor harus mengurus beberapa perizinan di beberapa dinas/lembaga yang berbeda, seperti untuk izin prinsip dan lokasi ke Disperindag dan PM, izin HO ke Satpol Pramong Praja, dan lain-lain. Banyaknya lembaga yang terlibat tanpa disertai koordinasi yang memadai akhirnya menyebabkan birokrasi yang tidak efisien. Memang koordinasi yang buruk antar



departemen merupakan salah satu masalah klasik di Indonesia dari sisi pemerintah.

Selain masalah perijinan yang belum satu atap, masalah yang lain adalah tidak adanya instansi yang akan melakukan pelaksanaan teknis berbagai upaya pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bangkalan. Hal ini sesuai dengan keputusan bupati yang mengalihkan fungsi penanaman modal dari Disperindag dan PM ke bagian Penanaman Modal, pemerintahan Umum, Sekretariat pemerintah Daerah.

Pengembangan penanaman modal di kabupaten Bangkalan juga terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia (tenaga kerja). Rendahnya produktifitas tenaga kerja serta budaya kerja yang negatif dari SDM di kabupaten bangkalan akan menjadi masalah tersendiri bagi pengusaha/investor yang akan membangun usaha di Kabupaten bangkalan. Selain itu, terkait dengan pengembangan penanaman modal yang sudah dilakukan kebanyakan pada sektor-sektor non pertanian, yaitu telekomunikasi, properti, dan jasa, maka kegiatan penanaman modal tersebut tidak dapat dirasakan/dinikmati oleh masyarakat Bangkalan. Kondisi ini terjadi karena kegiatan penanaman modal tersebut tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kebanyakan merupakan tenaga kerja pertanian.

Kabupaten Bangkalan sebenarnya memiliki banyak potensi yang berpeluang untuk penanaman modal. Tetapi potensi ini belum di eksplor sepenuhnya sehingga kegiatan penanaman modal yang sudah dilakukan masih sangat terbatas pada sektor-sektor tertentu. Upaya promosi investasi juga masih sangat terbatas. Promosi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menarik investor, karena melalui promosi akan diperoleh berbagai informasi tentang potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bangkalan.

Di balik peluang yang dapat diambil, kondisi pasca realisasi Jembatan Suramadu memiliki tantangan tersendiri bagi masyarakat Madura, sekaligus bagi pemerintahnya:

- a. Realisasi jembatan Suramadu cenderung mempercepat proses industrialisasi dan komersialisasi. Pada masa ini, sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa (sektor sekunder dan tersier) yang akan meningkat pesat. Segala bentuk kegiatan ekonomi (usaha) yang tidak berorientasi pada sektor-sektor sekunder dan tersier tersebut, bukan tidak mungkin akan gulung tikar. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan berbagai usaha yang ada yang dominan dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan Investasi yang tepat dan terarah. UMKM perlu dikembangkan



- Pada usaha yang berorientasi pada sektor sekunder dan tersier namun berbasis pada potensi dominan di Kabupaten Bangkalan.
- b. Kesiapan sumberdaya manusia maupun kelembagaan dalam usaha ekonomi produktif sebagian besar masyarakat Bangkalan (UMKM) juga merupakan tantangan tersendiri pasca realisasi jembatan Suramadu. Sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang dapat masuk pasar adalah mereka yang sesuai dengan kebutuhan industri dan komersialisasi. Jika masyarakat Kabupaten Bangkalan tidak mampu mengimbangnya, maka mungkin saja masyarakat akan menjadi tamu di wilayahnya sendiri. kebutuhan industri dan komersialisasi. Jika masyarakat Kabupaten Bangkalan tidak mampu mengimbangnya, maka mungkin saja masyarakat akan menjadi tamu di wilayahnya sendiri.
  - c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana (pelayanan publik), baik untuk usaha maupun pendukung usaha di Kabupaten Bangkalan. Bagaimana pun kuantitas dan kualitas pelayanan publik sangat mempengaruhi berkembang atau tidaknya kesejahteraan masyarakatnya.
  - d. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang terbatas. Fenomena yang terjadi pada masyarakat Madura, usia produktif di daerah perdesaan lebih memilih keluar dan bekerja di daerah lain yang berakibat berkurangnya usia produktif di daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan Kabupaten Sampang yang bisa dilihat dari indeks pendidikan, komponen indeks pembangunan manusia adalah yang terendah di Madura.
  - e. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, meski potensi produk pertanian di beberapa lokasi merupakan potensi yang patut dikembangkan, namun dominasi pertanian dengan praktek/proses pertanian yang masih konvensional merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku ataupun pemerintah dalam mengembangkannya.

## **VI. ISU STRATEGIS INVESTASI DI KABUPATEN BANGKALAN**

Berdasarkan analisis terhadap kondisi umum perekonomian Kabupaten Bangkalan, khususnya pada kondisi pembangunan dan analisis situasi, baik internal dan eksternal pengembangan investasi, maka dirumuskan beberapa isu strategis berikut ini:

1. Sistem kelembagaan yang mengurus pengembangan investasi di Kab. Bangkalan belum kondusif berupa: kurangnya koordinasi dari berbagai instansi yang terkait dengan pengembangan investasi, tidak



adanya lembaga pelaksana teknis pengembangan investasi, birokrasi perijinan belum satu atap, meskipun akan ada dinas khusus yang akan mengurus semua jenis perijinan.

2. Bidang/sektor utama penanaman modal yang dikembangkan lebih mengarah ke sektor sekunder, belum berbasis pada dominan sektor di Kab. Bangkalan yaitu Agribisnis.
3. Sumber dana investasi yang dikembangkan di Kabupaten Bangkalan berasal dari pemerintah dan swasta. Pengembangan konsep investasi islami akan sangat membantu pengembangan investasi di kabupaten Bangkalan, mengingat kultur masyarakat Bangkalan yang agamis.
4. Rendahnya eksplorasi potensi dan promosi pengembangan investasi
5. Kesiapan menyongsong pasca realisasi jembatan suramadu, terkait dengan kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Bangkalan.

## VII. PENUTUP

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut kabupaten Bangkalan untuk mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) sebagai instrumen penting untuk membiayai wewenang yang dimilikinya sebagai konsekuensi dari otonomi daerah itu sendiri. Salah satu upaya ini dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi ekonomi lokalnya sehingga dapat meningkatkan investasi didaerahnya. Kebijakan ini penting dilakukan, karena selama ini peningkatan PAD seringkali hanya dilakukan dengan memberlakukan berbagai pungutan melalui peraturan daerah (perda) atau retribusi yang dalam prakteknya justru memberatkan dunia usaha dan mengurangi nilai kompetitif daerah di mata investor.

Pengembangan investasi dalam rangka pengembangan ekonomi dan investasi didaerah otonom, selain memerlukan ketersediaan perangkat hukum, baik berupa perda maupun peraturan perundangan, juga sangat diperlukan kesiapan daerah dalam hal memberikan insentif atau kemudahan kepada calon investor dalam penyediaan sarana misalnya perolehan hak atas tanah, prasarana, keringanan biaya-biaya dan percepatan dalam pemberian ijin usaha. Tak kalah pentingnya adalah jaminan keamanan/keselamatan untuk berusaha. Semuanya itu merupakan permasalahan yang apabila tidak diatasi, akan menghambat laju perkembangan ekonomi dan investasi di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta, BPFE.



- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan, 2007, *Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Bangkalan Tahun 2007*, Bangkalan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2007, *Kabupaten bangkalan dalam Angka Tahun 2007*, Bangkalan.
- Boediono, 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta, BPFE.
- Dumairy, 1997, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bangkalan, 2007, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2007*, Bangkalan.
- , 2008, *Daftar Investasi di Kabupaten Bangkalan*, Bangkalan.
- Lumbuun, T. Gayus, 2005, *Permasalahan Investasi di daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 02/Vol. XIII/Mei 2005.
- Porter, M.E. (1980), *Competitive Strategy*, New York: Free Press.
- Porter, M.E. (1998a), *The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction*, New York: The Free Press.
- Porter, M.E. (1998b), *On Competition*, Boston: Harvard Business School Press. WEF (2004), *The Global Competitiveness Report 2004-2005*, Oxford University Press.
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakrta, LPFEUI.
- Tambunan, Tulus T.H. (2006), *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*, Jakarta: PT.Quantum Pustaka.
- , 2008, *Pengkajian Kebijakan Investasi Riil di Indonesia*, Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti.
- Todaro, Michael P, 2000, *Economic Development, Seventh Edition*, London, Addison Wesley Longman.